

ANALISA PENERAPAN PRINSIP *CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. PANASIA INDO RESOURCES, TBK

Steve Agustinus Himawan

Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra

Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya

E-mail: steve.a.himawan@gmail.com

Abstrak—Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya. PT. Panasia Indo Resources, Tbk. adalah perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang industri tekstil dan produk tekstil.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa penerapan tata kelola perusahaan pada PT. Panasia Indo Resources, Tbk. Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Sedangkan penentuan narasumber wawancara dilakukan melalui metode *snowball sampling* yang kemudian akan diuji keabsahannya dengan menggunakan triangulasi sumber.

Melalui hasil studi yang telah dilakukan pada PT. Panasia Indo Resources, Tbk., dapat diketahui bahwa penerapan prinsip *corporate governance* pada perusahaan sudah dilakukan dengan baik dalam hal Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kesetaraan.

Kata Kunci— Industri TPT, Perusahaan Terbuka, Tata Kelola Perusahaan

I. PENDAHULUAN

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan industri padat karya yang memiliki struktur industri yang lengkap dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Hal itu menjadikan industri Tekstil dan Produk Tekstil memiliki potensi untuk dapat berkembang dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. (Suarapembaruan.com, 2013).

Industri Tekstil dan Produk Tekstil nasional terus ditantang untuk meningkatkan daya saing dan mengoptimalkan eksistensinya pada pasar internasional, karena beberapa tahun terakhir mulai bermunculan negara industri tekstil baru yang dapat menjadi kompetitor bagi industri tekstil nasional. (Suarapembaruan.com, 2013). Sementara itu, industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia, khususnya Jawa Barat harus mampu berkompetisi dengan pesaing dari China. Hal itu dikarenakan adanya industri Tekstil dan Produk Tekstil yang berasal dari China dipastikan segera melakukan ekspansi ke Indonesia. Sejumlah investor yang berasal dari China dan Malaysia berencana mengembangkan industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia, khususnya Jawa Barat karena 60% dari industri Tekstil dan Produk Tekstil nasional berada di Jawa Barat. (Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 2012).

Pada tahun 2011, pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil mencapai 7,5% di atas rata-rata pertumbuhan industri manufaktur sebesar 6,2%. Indonesia dikenal sebagai negara pemasok produk Tekstil dan Produk Tekstil dengan kualitas internasional, dimana pada tahun 2012 nilai ekspor mencapai US\$ 12,46 milyar atau setara dengan 10,7% nilai ekspor non migas Indonesia. Dengan nilai ekspor tersebut Indonesia mampu memenuhi sekitar 1,8% kebutuhan dunia terhadap industri Tekstil dan Produk Tekstil. (Suarapembaruan.com, 2013).

Total untuk ekspor produk industri nonmigas pada Januari-September 2012 mencapai US\$86,99 milyar atau turun 5,25% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya dan ekspor produk industri Tekstil dan Produk Tekstil mengalami penurunan sebesar 6,86%. Penurunan tersebut disebabkan oleh karena melambatnya perekonomian dunia sehingga kinerja perdagangan khususnya negara-negara tujuan ekspor utama seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Asean terkena dampak. (Beritasatu.com, 2012). Penurunan pertumbuhan industri tekstil dunia disebabkan oleh krisis utang Amerika Serikat dan Eropa dan juga ditambah dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi China. (Berita.yahoo.com, 2011).

Pada tahun 2013 terjadi penurunan penjualan domestik pada industri Tekstil dan Produk Tekstil yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu dampak dari kebijakan kenaikan upah buruh dan tarif dasar listrik. Kenaikan harga Tekstil dan Produk Tekstil diperkirakan dapat mencapai 16,7%. Kenaikan harga tersebut berpotensi membuat Indonesia kehilangan pasar luar negeri. (Tempo.co, 2013).

Walaupun terjadi penurunan terhadap penjualan domestik, ekspor Tekstil dan Produk Tekstil pada semester I/2013 tetap naik meskipun hanya 3% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012, jauh lebih rendah daripada target yaitu sekitar 10%. Nilai ekspor untuk semester I/2013 mencapai US\$6Milyar. Nilai ekspor di Indonesia masih bisa tumbuh karena adanya kasus di Bangladesh yang menyebabkan pembeli Eropa dan Amerika Serikat beralih ke Vietnam, Kamboja, dan Indonesia. Melemahnya perekonomian dunia memberikan pengaruh pada perekonomian Indonesia. (Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 2013).

Dalam menghadapi situasi global yang secara umum kurang menguntungkan bagi industri Tekstil dan Produk Tekstil penerapan *Good Corporate Governance* sangat diperlukan. Selain untuk meningkatkan kinerja perusahaan, *Good Corporate Governance* dirasakan menumbuhkan kekuatan sinergi antara organ perusahaan dalam pencapaian visi dan misi perusahaan.

Contoh perusahaan yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* adalah Nestle. Komitmen nestle dalam hal *Corporate Governance* tercermin dan dijelaskan dalam beberapa publikasi seperti Laporan Tata Kelola Perusahaan, Anggaran Dasar, *Committee charters*, dan hal tersebut juga terlihat dari perilaku bisnis Nestle. Laporan tata kelola perusahaan Nestle meliputi struktur grup dan pemegang saham, *board of directors*, *executive board*, kompensasi, kepemilikan saham, pinjaman, partisipasi pemegang saham, auditor, dan kebijakan informasi. (nestle.com). Indofood Agri Resources juga merupakan perusahaan yang menerapkan *corporate government*. Perusahaan ini berkomitmen untuk terus meningkatkan standar prinsip tata kelola perusahaan dan proses dalam mengelola bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi perusahaan. Hal tersebut dapat terlihat dari laporan tata kelola perusahaan. (indofoodagri.listedcompany.com).

Meskipun Indonesia menempati urutan terbawah berdasarkan survei dari ACGA, tetapi di Indonesia sudah terdapat beberapa perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*, salah satunya adalah PT. Pania Asia Indo Resources, Tbk. PT. Pania Asia Indo Resources, Tbk. adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang menerapkan *Corporate Governance*.

PT. Pania Asia Indo Resources, Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang proses dan produksi serat kain dan benang. Kegiatan produksi pada PT. Pania Asia Indo Resources, Tbk. Meliputi proses polimerisasi, pembuatan *polyester yarn*, *polyester staple fiber*, *twisting*, *spinning*, pertambangan, *energy*, dan perdagangan umum.

PT. Pania Asia Indo Resources, Tbk. adalah perusahaan besar yang berfokus pada produksi tekstil. Disamping itu PT. Pania Asia Indo Resources, Tbk. dapat bertahan dan terus berkembang sejak tahun 1973. Meskipun *net sales* perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2012 yang disebabkan oleh keadaan industri Tekstil dan Produk Tekstil global, namun harga per saham pada perusahaan meningkat hingga Rp. 950,00 pada Desember 2012 hal ini tidak lepas dari peranan adanya *Good Corporate Governance* dalam perusahaan sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari pihak investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.

Berdasarkan KNKG (2006) dalam Wahyudin (2011), terdapat lima asas atau prinsip dalam *Good Corporate Governance* :

1. Transparency

Prinsip dasar asas transparansi (*transparency*) adalah untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Lebih lanjut KNKG (2006) menyebutkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan

saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Accountability

Prinsip dasar asas akuntabilitas (*accountability*) adalah bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dalam konteks ini KNKG (2006) menyebutkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati. Terkait dengan etika bisnis dalam Indonesia's *Code of Good Corporate*

3. Responsibility

Prinsip dasar asas tanggung jawab (*responsibility*) adalah bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dan dalam konteks ini KNKG (2006) menegaskan beberapa hal sebagai berikut bahwa :

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan

dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. *Independency*

Prinsip dasar asas independensi (*independency*) adalah untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dan KNKG (2006) dalam konteks ini menekankan bahwa :

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

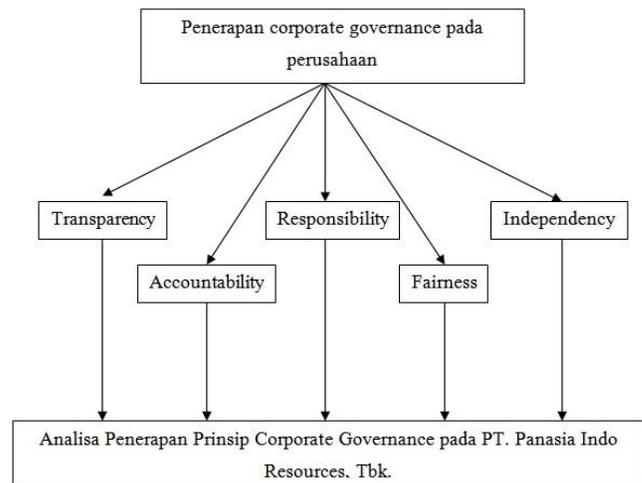
5. *Fairness*

Prinsip dasar asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) adalah bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dan dalam konteks ini KNKG (2006) menegaskan hal-hal sebagai berikut bahwa :

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Oleh karena hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk membahas Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Panasia Indo Resources, Tbk.

Gambar 1 adalah gambar kerangka berpikir pada penelitian Analisa Penerapan Prinsip Corporate Governance pada PT. Panasia Indo Resources, Tbk.



Gambar 1. Kerangka berpikir analisa penerapan prinsip Corporate Governance pada PT. Panasia Indo Resources, Tbk.
Sumber : Wahyudin (2011), KNKG (2006)

II. METODE PENELITIAN

Definisi Konseptual

Corporate Governance adalah sebuah sistem dan peraturan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, akuntabilitas perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*, dan memberikan nilai yang menguntungkan bagi semua pihak. Penulis menggunakan teori dari KNKG (2006) dalam Wahyudin (2011) mengenai prinsip *Corporate Governance*.

Terdapat lima prinsip dalam *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. *Transparency*

Dalam menjaga obyektivitas dalam bisnis perusahaan, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah untuk diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
- b. Media penyampaian informasi.
- c. Laporan keuangan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
- d. Pengambilan kebijakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- e. Kebijakan perusahaan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. *Accountability*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar.

- a. Penetapan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan karyawan secara jelas.
- b. Semua organ dalam perusahaan memiliki kemampuan sesuai dengan tugas dan berperan dalam *Good Corporate Governance*.
- c. Pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

- d. Memiliki pengukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan.
- e. Memiliki sistem *reward and punishment* dan etika bisnis.
- f. Setiap organ perusahaan berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku.
- g. Nilai-nilai perusahaan meliputi terpercaya, keadilan, dan kejujuran.
- h. Etika bisnis sebagai referensi untuk perusahaan dalam kegiatan bisnis dengan pemangku kepentingan.
- i. Budaya perusahaan berasal dari etika bisnis.
- j. Perusahaan harus memiliki *code of conduct*.
- k. Pemangku kepentingan harus mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi.
- l. Setiap anggota perusahaan dilarang untuk memberikan dan menerima hadiah dan donasi yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
- m. Anggota perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di perusahaan.
- n. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi.
- o. Perusahaan harus menyusun peraturan untuk melindungi informasi mengenai pelanggaran yang terjadi.

3. *Responsibility*

Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan kerja.

- a. Kepatuhan terhadap perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan.
- b. Perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial terutama pada lingkungan kerja.

4. *Independency*

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga tidak ada dominasi dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

- a. Pengambilan keputusan secara obyektif, terhindar dari dominasi, kepentingan tertentu, *conflict of interest*, atau tekanan.
- b. Setiap organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan dengan tidak adanya dominasi atau pelemparan tanggung jawab.
- c. Adanya badan audit independen.

5. *Fairness*

Perusahaan dalam pelaksanaannya harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

- a. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat serta terbukanya akses informasi.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi.
- c. Tidak ada diskriminasi dan menghargai keragaman dalam perekrutan maupun dalam perusahaan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisa

data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2010).

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dan data sekunder didapatkan dari dokumen perusahaan dan internet. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara.

Penentuan informan menggunakan cara *snowball sampling* dari presiden direktur perusahaan.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan oleh informan secara lisan. Data yang telah terkumpul kemudian dipelajari, diteliti, dan dianalisa secara utuh. Sehingga nantinya akan diperoleh penjelasan dan ditarik kesimpulan secara logis.

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber, memilih data mana yang sesuai dan tidak sesuai, menarik, dan penting untuk penelitian yang pada tahap ini disebut reduksi data, setelah data dipilih maka disajikan dalam bentuk uraian penjelasan, dan menarik kesimpulan serta memberi saran dari uraian penjelasan tersebut.

Miles dan Huberman (1994), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Menurut Miles dan Huberman (1994), tahapan reduksi data adalah meringkas data kontak langsung dengan orang, kejadian, dan situasi di lokasi penelitian, termasuk memilih dan meringkas dokumen yang relevan; pengkodean; pembuatan catatan objektif; pembuatan catatan reflektif; pembuatan catatan marginal; penyimpanan data; pembuatan memo; analisis antarlokasi; dan ringkasan sementara.

Berdasarkan Miles dan Huberman (1994), yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dinilai melalui beberapa metode antara lain mengecek keterwakilan data, mengecek data dari pengaruh peneliti, mengecek melalui triangulasi, melakukan pembobotan bukti dari sumber yang dipercaya, melakukan perbandingan atau mengkontraskan data, dan menggunakan kasus ekstrim yang direalisasikan dengan memaknai data negatif.

Dalam menganalisa data-data yang ada, akan digunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2010), "triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu".

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Macam-macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan

selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh tidak hanya dari satu teknik saja namun beberapa teknik misalnya wawancara, observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Karena itu pengujian melalui triangulasi waktu dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber untuk membandingkan data yang diperoleh antara sumber yang satu dengan lainnya kemudian mencocokkannya agar data-data tersebut berkualitas dan dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik triangulasi sumber. Yang dimaksud dengan triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah didapat dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari sumber data yang telah dikumpulkan. Sugiyono (2010).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Corporate Governance adalah sebuah sistem dan peraturan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, akuntabilitas perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*, dan memberikan nilai yang menguntungkan bagi semua pihak.

Dalam Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) terdapat lima buah prinsip *corporate governance* yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness*.

1. *Transparency*

Transparency dalam sebuah perusahaan diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak terhadap perusahaan. Dengan adanya prinsip *transparency* pada perusahaan maka secara tidak langsung perusahaan memudahkan akses terhadap investasi asing maupun domestik karena data perusahaan dapat diperoleh dan mudah dipahami oleh pihak investor. Dan dengan dilaksanakannya prinsip *transparency* dengan baik maka dapat juga untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* dan *shareholders* terhadap perusahaan.

Dalam prinsip *transparency*, penulis menetapkan beberapa indikator, antara lain penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan; adanya media penyampaian informasi; laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak berkepentingan; pengambilan kebijakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan kebijakan perusahaan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Media yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi ke dalam perusahaan adalah peraturan yang ditempelkan dan juga peraturan resmi yang tertulis. Contoh untuk peraturan yang ditempelkan dalam perusahaan adalah visi dan misi perusahaan dan peraturan dan SOP. Untuk contoh peraturan resmi tertulis adalah tentang penegakan disiplin karyawan. Sedangkan untuk informasi yang digunakan untuk penyajian informasi di dalam perusahaan mengenai kinerja perusahaan adalah *software* SAP.

Peraturan dan SOP dalam perusahaan juga dikomunikasikan kepada karyawan dengan cara ditempelkan pada hal yang terkait dengan peraturan tersebut, sehingga meminimalisasi kelalaian karyawan untuk bekerja diluar dari peraturan. SOP dalam perusahaan mencakup *quality manual*, prosedur, *work instruction*, spesifikasi, dan tabel kerja. Contohnya adalah peraturan yang mewajibkan karyawan untuk memakai seragam dan sepatu pada jam kerja dan juga larangan untuk naik sepeda di area produksi Polymer II. Peraturan lain adalah mengenai *energy saving* yang ditempelkan di depan panel lampu penerangan yang berbunyi “lampu penerangan dinyalakan 24 jam sebanyak 23 lampu 40 watt dan 8 lampu 20 watt MCB no. 2, 5, 6, 15, dan ditambah lagi 4 lampu 40 watt mulai jam 18.00 s/d 06.00 MCB no. 14 dan MCB no. 3 di *on* kan apabila ada pengecekan sedangkan lampu yang lain bisa dinyalakan apabila ada *trouble*.”

Contoh peraturan tertulis resmi perusahaan adalah peraturan yang melarang pekerja untuk tidur pada saat kerja. Peraturan tersebut berisikan mengenai larangan untuk tidur pada saat jam kerja sedang berlangsung. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa tidur adalah salah satu pelanggaran berat karena menyebabkan efisiensi dan efektifitas kerja perusahaan menjadi rendah. Sanksi untuk pelanggaran terhadap peraturan ini dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa syarat.

Salah satu SOP dari perusahaan yaitu pedoman mutu. Pada pedoman tersebut dijelaskan bahwa sistem manajemen mutu diterapkan perusahaan pada produksi apa saja dan berada pada lokasi apa.

Dengan adanya SOP dalam wujud prosedur serah terima barang, maka proses pemindahan barang dari bagian logistik kepada user yang meminta barang tersebut akan berlangsung secara transparan karena disertai dengan dokumen, sehingga dapat meminimalisasi adanya tindak kecurangan dalam perusahaan. Selain diperkuat dengan dokumen prosedur ini juga mencakup inspeksi kuantiti barang.

Spesifikasi dalam perusahaan berguna untuk menjaga kualitas produksi dari perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang sesuai dengan spesifikasi dari perusahaan. Tabel kerja digunakan untuk pengambilan sample yang dilakukan secara berkala. Dengan adanya tabel tersebut maka perusahaan dapat menjaga dan mengetahui kualitas produksi dari masing-masing mesin yang ada. Alur informasi dalam perusahaan adalah berjenjang dari direktur lalu ke kepala bagian atau personalia.

Media yang digunakan perusahaan untuk menyalurkan informasi internal baik kepada manajemen atau pemangku kepentingan dalam perusahaan adalah sistem *software* SAP (*Systeme, Anwendungen und Produkte in der*

Datenverarbeitung atau dalam bahasa Inggris *Systems, Applications and Products in Data Processing*) dalam penyampaian informasi di dalam internal perusahaan. SAP adalah *software* buatan Jerman yang digunakan untuk melakukan *management* pada operasi bisnis dan relasi konsumen.

Penggunaan *software* SAP pada perusahaan menurut *corporate secretary* perusahaan dapat menyediakan informasi mengenai kapasitas produksi, barang yang keluar dan masuk, dan dari *software* ini bagian audit dapat mengetahui jika ada masalah yang terjadi misalnya kekurangan produksi atau kelebihan produksi. *Software* ini baik bagi perusahaan karena dapat menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan juga selain itu informasi dapat diketahui dengan cepat. Dengan menggunakan *software* ini merupakan sebuah nilai tambah bagi perusahaan karena dengan *software* ini kinerja perusahaan dapat dinilai dan selain itu belum banyak perusahaan yang menggunakan sistem SAP ini di Indonesia karena nilai investasinya yang cukup tinggi.

Media yang digunakan perusahaan untuk menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan kepada pemangku kepentingan, pemegang saham dan atau juga umum adalah *annual report*, *upload* data ke Bursa Efek Indonesia, *public expose*, dan juga RUPS.

Laporan tahunan atau *annual report* adalah salah satu media perusahaan dalam menampaikan informasi kepada pemangku kepentingan dan juga pemegang saham. Dalam laporan tahunan tersebut terdapat didalamnya data perusahaan, ringkasan data keuangan, perkembangan saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, struktur organisasi, profil singkat dari dewan komisaris dan direksi, analisa keuangan dan pertumbuhan usaha, tata kelola perusahaan yang baik, laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, dan laporan auditor independen.

Selain laporan tahunan, perusahaan juga mengadakan *public expose* untuk menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dipahami. Pada *public expose* perusahaan memberikan informasi mengenai Ringkasan data ekspor dalam US\$ juta dan Rp milyar PT. Panasia Indo Resources, Tbk., Harga bahan baku PTA & MEG (dalam US\$), Penjualan berdasarkan segmen geografis dalam US\$ juta – Rp milyar, Kinerja berdasarkan segmen usaha (Dalam Rp milyar), Kinerja keuangan dalam Rp Milyar (kecuali laba bersih), Kondisi usaha, dan Prospek usaha, sehingga dari *public expose* pemegang saham dapat mengetahui bagaimana kinerja dari perusahaan dalam jangka waktu berjalan. *Public expose* dari perusahaan dibawakan oleh jajaran direksi dari perusahaan.

Salah satu indikator lain dalam hal *transparency* dalam hal media penyampaian informasi dan juga akses informasi adalah informasi pada PT. Panasia Indo Resources, Tbk. dapat dilihat pada *website* Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id, dengan *code* HDTX. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan melakukan *upload* secara berkala ke bursa dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya informasi baik itu *financial report* maupun *annual report* perusahaan pada *website* Bursa Efek Indonesia.

Financial report yang ada pada *website* Bursa Efek Indonesia antara lain *balance sheet*, *cash flow*, *change of equity*, *income statement*, dan *notes to financial statement*. *Report* pada *website*. Bahkan melalui *website* Bursa Efek Indonesia dapat diketahui *corporate action* yang dilakukan perusahaan seperti hasil RUPS, rencana transaksi afiliasi, dan surat pernyataan dewan direksi.

Website PT. Panasia Indo Resources, Tbk. didalamnya terdapat *company profile* secara singkat, penjabaran hasil produksi dari perusahaan, mengenai divisi *textile*, *information technology*, *power plant* dan juga *contact* perusahaan. *Website* PT. Panasia Indo Resources, Tbk. dapat diakses melalui url www.panasiaresources.co.id. Pada *website* tersebut dijelaskan bahwa PT. Panasia Indo Resources, Tbk. awalnya memiliki nama PT. Harapan Djaja Empat yang selanjutnya berubah menjadi PT. Hadtex Indosyntec, lalu menjadi PT. Panasia Indosyntec, Tbk.

Indikator lain adalah dokumen perusahaan berupa laporan dari perusahaan dimana perusahaan telah melakukan undangan untuk RUPS yang ditempatkan pada surat kabar *Investor Daily* dan juga majalah Bandung *Ekspress*. Laporan tersebut ditujukan oleh PT. Panasia Indo Resources, Tbk. kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi untuk melakukan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan, dan merupakan badan independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang menggantikan peran dari Bapepam-LK. Dalam laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tersebut juga disebutkan kapan undangan RUPS telah dilakukan oleh PT. Panasia Indo Resources, Tbk. Hal tersebut merupakan salah satu cara perusahaan dalam menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan dan pemegang saham.

Selain memenuhi indikator mengenai transparansi, dapat diketahui juga bahwa perusahaan telah melakukan kewajibannya menaati peraturan dalam hal melakukan pelaporan bahwa telah dilakukan undangan RUPS melalui surat kabar *Investor Daily* dan juga majalah Bandung *Ekspress* kepada Otoritas jasa Keuangan.

Proses pengambilan keputusan atau kebijakan dalam perusahaan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan, namun apabila ada pemangku kepentingan yang berhalangan maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan minimal dua orang direksi, seperti yang telah diatur di dalam anggaran dasar perusahaan, yaitu pasal 12 mengenai tugas dan wewenang direksi, pasal 12 ayat 6b yang berbunyi “Dalam hal Direktur Utama tidak hadir dan/atau tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.”. Proses komunikasi kebijakan dalam perusahaan melalui RUPS dan adanya meeting koordinasi secara berkala.

Pembatasan informasi dalam perusahaan hanya sebatas mengenai strategi baru yang belum dipublikasikan ataupun informasi yang belum dirilis, namun pada akhirnya informasi tersebut akan tetap dipublikasikan oleh perusahaan.

Pembatasan informasi tersebut dilakukan melalui meeting yang berjenjang sesuai dengan levelnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan data dari perusahaan, menurut penulis prinsip *transparency* pada PT. Panasia Indo Resources, Tbk. telah berjalan dengan cukup baik karena memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh penulis dan sesuai dengan KNKG (2006). Perusahaan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses. Informasi visi dan misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan pengurus, pemegang saham, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan *good corporate governance* terdapat pada *annual report* dan juga *public expose*. Disamping itu prinsip keterbukaan yang berlangsung tidak mengurangi kerahasiaan informasi perusahaan seperti strategi perusahaan yang belum dipublikasikan. Kebijakan dalam bentuk peraturan di dalam perusahaan secara tertulis dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan melalui RUPS dan meeting koordinasi secara berkala.

Penyampaian informasi dari perusahaan terhadap pemegang saham dan juga pemangku kepentingan melalui *annual report*, *upload* data ke bursa, dan *public expose* adalah cara yang baik yang ditempuh perusahaan dalam memberikan informasi lengkap dan terbaru kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Cara penyampaian visi dan misi perusahaan kepada karyawan juga sudah dilakukan dengan baik, hanya saja pada tahun 2012 terjadi perubahan visi dan misi dari perusahaan, namun visi dan misi yang ditempelkan pada tembok-tembok ruang kerja belum terganti. Pembaruan visi dan misi yang ditempelkan pada tembok-tembok ruang kerja diperlukan untuk dapat tetap menyalurkan visi dan misi dengan tepat kepada karyawan.

Selain visi dan misi, website perusahaan akan sangat baik apabila juga diperbarui dan dilengkapi. *Website* perusahaan dapat diperbarui dengan informasi-informasi terbaru dan juga dapat dilengkapi dengan laporan-laporan yang berisikan dengan informasi-informasi yang terkait dengan perusahaan seperti laporan keuangan dan juga kebijakan-kebijakan dari perusahaan, sehingga prinsip transparansi yang dilakukan oleh perusahaan dapat lebih didukung dan dimaksimalkan dengan adanya *website* perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap.

2. *Accountability*

Akuntabilitas diperlukan dalam perusahaan sebagai salah satu alat untuk mengukur tanggung jawab dari perusahaan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam hal *accountability* penulis menerapkan beberapa indikator untuk menguji prinsip *accountability* yang ada di dalam perusahaan. Indikator tersebut antara lain rincian tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan, kemampuan seluruh organ perusahaan dalam berperan terhadap *good corporate governance*, adanya pengendalian internal dalam perusahaan, pengukuran kinerja, sistem *reward and punishment*, dan *code of conduct* yang didalamnya mencakup etika bisnis, pedoman perilaku, nilai-nilai perusahaan, etika bisnis sebagai referensi untuk perusahaan dalam kegiatan bisnis, budaya perusahaan, pendahuluan kepentingan perusahaan, larangan dalam

menerima donasi, kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, kerahasiaan informasi, dan perlindungan terhadap pelaku pemberi informasi mengenai pelanggaran.

Pada PT. Panasia Indo Resources, Tbk. rincian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing departemen atau divisi tertera dalam *job description*. Dalam *job description* pada perusahaan tertera mengenai fungsi, tugas, dan wewenang dari setiap jabatan dalam perusahaan.

Hal ini sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu rincian tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan. Dengan adanya rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap karyawan, maka setiap bagian dalam perusahaan dapat memahami dengan jelas fungsi, tugas, dan juga wewenangnya. Dengan adanya *job description* setiap departemen atau divisi dalam perusahaan dapat bekerja sesuai dengan tugasnya sehingga secara tidak langsung pekerjaan dalam perusahaan dapat terhindar dari adanya diskriminasi ataupun pelimpahan karena setiap bagian memiliki tugas masing-masing. Disamping itu dengan adanya *job description* bagi setiap bagian dalam perusahaan maka bagian-bagian atau organ-organ perusahaan tersebut dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan.

Pengendalian *internal* di dalam perusahaan dilakukan dengan adanya *internal audit* dan juga *Quality Assurance*. Pada perusahaan eksternal *audit* dipilih berdasarkan RUPS. *Internal audit* bersifat pencegahan dan memeriksa secara prosedural, rutinitas, dan keuangan. *Internal audit* dilakukan berdasarkan evaluasi dari sistem SAP dan apabila ditemukan adanya hal yang harus dievaluasi, maka *internal audit* melakukan analisa *audit* yang akan menghasilkan rekomendasi bagi bagian yang terkait. *Quality Assurance* dilakukan untuk melakukan evaluasi yang bersifat prosedural.

Pengendalian *internal* dalam perusahaan membantu perusahaan untuk dapat tetap bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan juga untuk melakukan pengawasan dan evaluasi apabila terjadi ketidakseimbangan dalam perusahaan baik itu dalam hal produksi ataupun keuangan perusahaan. Adanya *quality assurance* dalam perusahaan berguna untuk melakukan kontrol kualitas terhadap perusahaan, sehingga *quality assurance* melakukan evaluasi mengenai prosedur-prosedur yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya sistem SAP seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, *internal audit* dapat mengetahui apabila adanya ketidakseimbangan dalam perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal maka perusahaan dapat berjalan sebagaimana seharusnya dan terhindar dari adanya ketidakseimbangan atau tindak kecurangan maupun korupsi dalam perusahaan.

Pengendalian kinerja dan juga *monitoring* dalam perusahaan dilakukan dengan adanya *meeting* secara berkala. Dalam *meeting* tersebut setiap kepala bagian mempresentasikan kepada direksi mengenai apa saja yang telah dicapai dan apa saja yang akan dilakukan untuk waktu yang akan datang sekaligus hambatanya. Pengukuran kinerja dalam perusahaan juga berjalan dalam *meeting* secara berkala tersebut, karena akan terlihat pencapaian dan prestasi dari divisi tertentu.

Dalam perusahaan terdapat *code of conduct* diantaranya etika bisnis, etika bisnis sebagai referensi untuk kegiatan bisnis, pedoman perilaku, nilai perusahaan, budaya perusahaan, benturan kepentingan, larangan penerimaan adanya hadiah atau donasi, kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, kerahasiaan informasi, dan juga perlindungan terhadap pelaku pemberi informasi mengenai pelanggaran.

Menurut *Corporate Secretary* PT. Panasia Indo Resources, Tbk., *Code of conduct* dalam perusahaan diimplementasikan dalam etika berbisnis Perusahaan dan etika perilaku individu di jajaran Perusahaan. Etika berbisnis Perusahaan terkait dengan aspek yang kritis terhadap jalannya operasional perusahaan diantaranya adalah etika dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesempatan kerja yang adil dan yang lainnya. Sedangkan etika perilaku individu di jajaran Perusahaan terkait dengan integritas dan komitmen, penyalahgunaan jabatan dan wewenang, etika berhubungan dengan manajemen dan sesama karyawan dan yang lainnya.

Contoh etika dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan adalah terhadap pemerintah perusahaan mematuhi peraturan pemerintah, perusahaan mematuhi peraturan OJK dalam penyelenggaraan RUPS, perusahaan mengumumkan dan mengundang para pemegang saham misalnya melalui iklan koran. Contoh etika terhadap kepedulian lingkungan adalah perusahaan menyediakan penerangan dan air gratis bagi warga sekitar lokasi pabrik. Contoh etika kesehatan dan keselamatan kerja adalah perusahaan membentuk panitia Pembina keselamatan dan kesehatan karyawan (P23K), memberikan masker dan menyediakan helm kerja. Contoh etika terhadap kepatuhan perundangan adalah perusahaan mematuhi peraturan termasuk tentang jamsostek.

Contoh etika dalam kesempatan kerja yang adil adalah perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama bagi calon yang memenuhi kualifikasi, bukan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kondisi nyata di perusahaan karyawan terdiri dari berbagai suku. Contoh etika yang berhubungan dengan manajemen dan sesama karyawan adalah karyawan mengauai adanya struktur organisasi dalam manajemen, mengenai hubungan sesame karyawan adalah berlandaskan sikap saling menghargai atas hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam perusahaan terdapat etika bisnis yaitu kejujuran dan keadilan bagi semua pihak, secara garis besar etika dari perusahaan adalah tidak merugikan pihak lain sehingga dapat memberikan kepuasan pada semua pihak. Selain etika tersebut dalam perusahaan terdapat budaya yaitu memberikan yang terbaik. Dalam hal ini terbaik kepada seluruh aspek yang terkait dengan perusahaan mulai dari *supplier*, konsumen, karyawan, direksi, sampai pemegang saham.

Etika dan budaya yang terdapat dalam perusahaan tersebut merupakan dasar perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis. Dengan adanya kejujuran dan keadilan bagi semua pihak dan juga memberikan yang terbaik, maka dapat diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis perusahaan memberikan kualitas hasil produksi sesuai dengan permintaan konsumen, tidak dilakukan adanya kecurangan, dengan etika yang

menyebutkan keadilan bagi semua pihak dalam melakukan kegiatan bisnis perusahaan memperlakukan setiap konsumennya dengan sama dan adil, dan disamping itu dengan budaya memberikan yang terbaik maka dapat diketahui pula bahwa perusahaan sebisa mungkin memberikan hasil produksi dengan kualitas yang semaksimal mungkin kepada konsumen.

Pedoman perilaku dalam perusahaan hanya sebatas peraturan kepersonaliaian secara umum saja. Ada baiknya apabila pedoman perilaku dari perusahaan dibuat lebih detail dan setiap bagian memiliki pedoman perilaku tersendiri sehingga dapat menunjang terjadinya *good corporate governance* dalam perusahaan.

Nilai pada perusahaan mencerminkan terpercaya karena semua hal dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, ada target, dan terdapat *supervisor* untuk mengawasi; kejujuran juga tercermin di dalam perusahaan karena sampai saat ini belum pernah terjadi adanya tindak pencurian ataupun pekerja yang tidur pada *shift* malam hari saat perusahaan berjalan 24 jam; dan keadilan juga tercermin dari semua orang pada perusahaan ini dibayar sesuai dengan hak, kewajiban, dan porsinya. Perusahaan memastikan bahwa organ perusahaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan melalui prosedur yang telah ditetapkan dan juga proses audit secara berkala.

Kepentingan perusahaan juga didahulukan dengan menghindari adanya benturan kepentingan dari pihak tertentu. Benturan kepentingan dihindari dengan adanya diskusi dalam *meeting* koordinasi, *meeting* koordinasi direksi, dan apabila menyangkut dengan pemegang saham maka keputusan selalu diputuskan dengan diagendakan pada RUPS.

Dengan dilakukannya diskusi dalam *meeting* dan atau keputusan diambil berdasarkan banyak pihak, maka dapat diketahui bahwa proses pengambilan keputusan dalam perusahaan telah terhindar dari adanya benturan kepentingan dan selalu mendahulukan kepentingan perusahaan. Dengan didahulukannya kepentingan perusahaan maka perusahaan dapat berkembang dengan lebih baik karena kepentingan dari perusahaan selalu diutamakan.

Peraturan dalam hal larangan memberikan atau menerima sesuatu dari pihak manapun tercermin dengan adanya beberapa tulisan larangan tersebut pada beberapa bagian dari perusahaan dan juga peraturan dari perusahaan dalam wujud surat edaran. Bahkan perusahaan menetapkan sanksi keras bagi pelanggaran terhadap larangan ini, yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja.

Sanksi yang diberikan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dengan sangat tegas mengharapakan kepada setiap karyawannya untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya sanksi yang keras dan tegas maka perusahaan meminimalisasi adanya tindak atau kecenderungan karyawan dalam perusahaan untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jika pelanggaran peraturan berada dalam taraf yang *minimal*, maka perusahaan dapat berjalan dengan maksimal dan juga secara tidak langsung mengurangi adanya penurunan kinerja dari karyawan terhadap perusahaan.

Cara perusahaan dalam menjaga kerahasiaan informasi adalah dengan melakukan *meeting* secara berjenjang dimana anggotanya disesuaikan dengan jenjangnya, disamping itu

pada saat meeting *president director* atau komisaris menyampaikan kepada anggota *meeting* untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam *meeting* tersebut. Bagi karyawan yang membocorkan informasi rahasia dari perusahaan akan mendapatkan sanksi berupa teguran hingga Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam perusahaan tidak ada peraturan tertulis untuk melindungi informasi terhadap adanya pelanggaran dalam perusahaan. Tetapi jika ada pihak yang melaporkan adanya pelanggaran, maka kerahasiaan pelapor baik nama dan jabatannya akan dilindungi oleh perusahaan. Disamping itu perusahaan memiliki team tersendiri yang bertugas.

Implementasi *code of conduct* dari perusahaan tersebut baik untuk menjaga objektifitas perusahaan dalam bekerja dan juga untuk menjaga stabilitas perusahaan dalam proses bisnisnya. Dengan tidak adanya penyalahgunaan wewenang maka perusahaan dapat terhindar dari kepentingan sepihak. Dengan adanya hal tersebut maka perusahaan dapat menjaga akuntabilitasnya karena perusahaan akan dapat berjalan sebagaimana seharusnya.

Dengan diterapkannya *code of conduct*, adanya rincian tugas dan tanggung jawab, pengendalian internal dan juga pengukuran kinerja, maka perusahaan dapat membuat seluruh organ dalam perusahaan memiliki kemampuan untuk berperan dalam mencapai tujuan perusahaan dan juga dalam proses tercapainya penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan.

Pada PT. Panasia Indo Resources, Tbk. terdapat sistem *reward and punishment*, namun hal tersebut bukan merupakan sebuah aturan tertulis. *Reward* dalam wujud insentif akan diberikan untuk pencapaian dalam suatu target dan *punishment* juga ada apabila target tidak tercapai

Berdasarkan dari hasil wawancara dan data dari perusahaan, menurut penulis prinsip *accountability* dalam PT. Panasia Indo Resources, Tbk. telah berjalan dengan cukup baik karena memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh penulis dan sesuai dengan KNKG (2006). Perusahaan telah menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab sehingga masing-masing organ perusahaan dapat memiliki kemampuan sesuai tugas, tanggungjawab, dan perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*, sistem pengendalian internal perusahaan berjalan efektif dengan adanya sistem SAP yang dapat menjadi acuan dari internal audit dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dalam perusahaan dan memberikan evaluasi berupa rekomendasi, perusahaan memiliki sistem *reward and punishment*, dan berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Hanya saja terdapat beberapa indikator yang ada namun bukan merupakan hal atau peraturan yang tertulis dari perusahaan.

3. Responsibility

Responsibilitas adalah wujud tanggung jawab perusahaan dalam wujud kepatuhan terhadap peraturan pemerintah maupun tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Tujuan dari responsibilitas adalah memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dengan cara mematuhi peraturan perundang-undangan dan juga serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pada prinsip *responsibility* penulis menerapkan dua buah indikator yaitu kepatuhan perusahaan terhadap Undang-undang yang berlaku dan juga perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial.

Dalam hal *responsibility*, perusahaan sudah mematuhi peraraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari belum pernah terdengar perusahaan melanggar peraturan baik dalam hal perijinan maupun upah. Upah yang didapatkan oleh karyawan pada perusahaan adalah diatas dari UMK kota Bandung, provinsi Jawa Barat. Hak yang diperoleh oleh karyawan perusahaan selain gaji pokok adalah tunjangan kesehatan, uang lembur, dan asuransi tenaga kerja.

UMK Bandung tahun 2013 adalah Rp. 1735.473 dan perusahaan telah membayarkan upah lebih tinggi dari UMK. Karyawan perusahaan yang mendapatkan gaji sesuai dengan UMK masih mendapatkan penghasilan tidak tetap seperti bonus atau insentif sehingga pada akhirnya nominal upah karyawan adalah diatas UMK.

Selain itu perusahaan telah mematuhi undang-undang mengenai perpajakan dalam hal pengenaan PPN atas barang dan jasa dan PPh Badan. Perusahaan juga telah menjalankan undang-undang perseroan terbatas diantaranya kewajiban RUPS untuk penyampaian laporan keuangan tahunan dan kewajiban dilakukan audit untuk laporan keuangan sehubungan sebagai perusahaan terbuka.

Undang-undang perlindungan konsumen tidak relevan untuk diterapkan pada perusahaan karena perusahaan tidak memproduksi makanan atau minuman dan produk jadi dari perusahaan adalah benang. Perlindungan pada perusahaan lebih merujuk pada perlindungan terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan dengan adanya pengolahan limbah.

Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pertanggungjawaban sosial terhadap lingkungan, pada perusahaan terdapat berbagai kegiatan sosial misalnya donor darah dan khitanan masal yang dilakukan secara berkala. Selain hal itu perusahaan juga memberikan penerangan dan air bersih secara gratis kepada warga di lingkungan sekitar. Untuk hal limbah, limbah perusahaan dialirkan ke pengolahan limbah yang dikelola oleh pemerintah, lalu setelah limbah di sterilkan baru dialirkan ke sungai. Dengan adanya instalasi pengolahan air limbah ini, perusahaan tidak melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Hal ini merupakan salah satu indikator *responsibility* pada perusahaan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan data dari perusahaan, menurut penulis prinsip *responsibility* pada PT. Panasia Indo Resource, Tbk. telah berjalan dengan baik karena telah sesuai dengan KNKG (2006) yang diantaranya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan cara peduli terhadap masyarakat dan juga kelestarian lingkungan sekitar perusahaan. Perusahaan telah memenuhi tanggungjawabnya baik itu dalam segi menaati regulasi yang diterapkan oleh pemerintah maupun tanggungjawabnya terhadap lingkungan sekitarnya.

4. Independency

Independency diperlukan dalam perusahaan untuk dapat menghindari adanya intervensi dari pihak tertentu yang dapat

mempengaruhi baik proses maupun hasil dari pengambilan keputusan pada perusahaan. Selain itu untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi.

Indikator yang ditetapkan oleh penulis dalam hal *independency* adalah pengambilan keputusan secara objektif, terhindar dari dominasi, tekanan, maupun *conflict of interest*; organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan dengan tidak adanya dominasi atau pelemparan tanggung jawab; dan adanya badan audit independen.

Organ perusahaan meliputi RUPS, dewan komisaris, dan direksi. RUPS menjadi wadah bagi para pemegang saham untuk dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan penting bagi perusahaan. Contoh konkritnya adalah digelarnya RUPS pada tahun 2013 dengan agenda pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2012.

Dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Melalui rapat dewan komisaris, diputuskan persetujuan dewan komisaris atas rencana direksi yang mempunyai dampak penting bagi perusahaan. Salah satu contoh konkritnya adalah rapat dewan komisaris mengenai persetujuan atas rencana kerja tahun 2014.

Direksi bertugas dan bertanggungjawab untuk mengelola perseroan sesuai anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing anggota direksi melakukan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Salah satu contoh konkritnya adalah anggota direksi yang bertanggungjawab atas keuangan Perusahaan, menyusun laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan setiap tutup tahun buku (31 Desember).

Pengambilan keputusan dalam perusahaan dilakukan dengan cara dimusyawarahkan dan didiskusikan terlebih dahulu sehingga proses pengambilan keputusan terjadi secara objektif, independen, dan terhindar dari adanya intervensi dari pihak tertentu. Indikatornya adalah adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar organ Perusahaan, yaitu dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengambilan keputusan Perusahaan, jajaran Dewan Komisaris yang mengawasi jalannya manajemen, dan jajaran Direksi yang menjalankan manajemen Perusahaan.

Dalam proses pengambilan keputusan tidak terjadi adanya dominasi karena berbagai pihak yang terkait ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bahkan untuk hal yang berkaitan dengan karyawan, maka perwakilan dari serikat buruh juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Musyawarah dan diskusi yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan akan dapat membawa keputusan yang diambil menjadi objektif karena proses pengambilan keputusan ini melibatkan pihak-pihak yang terkait. Dimana dengan adanya banyak pihak yang dipertemukan maka pengambilan keputusan akan terhindar dari adanya kepentingan dari suatu pihak tertentu ataupun dominasi, melainkan keputusan yang diperoleh menjadi objektif karena semua pihak ikut memberikan pendapatnya.

Semua organ perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar sehingga pelimpahan atau pelemparan tanggung jawab tidak terjadi di dalam perusahaan karena semua berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Badan audit independen dalam perusahaan adalah internal audit, quality assurance, dan juga jasa konsultan dari luar yang ditetapkan dalam RUPS yang diadakan secara tahunan. Perusahaan menggunakan jasa akuntan publik, untuk pengajuan pinjaman ke bank (misal Kredit Investasi atau Kredit Modal Kerja), Perusahaan melakukan studi kelayakan (FS = *Feasibility Study*) dengan menggunakan jasa penilai publik independen.

SOP dalam perusahaan adalah *quality manual*, prosedur, *work instruction*, spesifikasi, tabel kerja. Dengan adanya *quality manual* dan spesifikasi yang menjadi pedoman mutu perusahaan, maka dalam perusahaan tidak akan ada intervensi yang berhubungan dengan kualitas produksi dari perusahaan karena kualitas dan spesifikasi barang telah ditentukan oleh perusahaan. SOP perusahaan dalam wujud prosedur dan *work instruction* dapat berguna untuk *independency* perusahaan karena dalam proses produksinya dengan adanya prosedur dan *work instruction* tersebut maka proses produksi dapat terhindar dari intervensi pihak yang berkepentingan karena prosedur dan intruksi pekerjaan terdapat dari perusahaan. Tabel kerja dalam perusahaan juga menghalangi adanya intervensi dari pihak lain karena dengan adanya tabel tersebut maka semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut akan tercantum dalam tabel tersebut dan dapat diketahui dengan mudah.

Dengan adanya SOP maka organ dalam perusahaan dan karyawan dalam perusahaan dapat bekerja sebagaimana dengan ketentuan perusahaan. Dengan dijalankannya SOP dan adanya *internal audit* dan *quality assurance* yang melakukan audit dan juga memberikan rekomendasi, maka perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan menghindari adanya intervensi dari pihak tertentu yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam perusahaan.

Anggaran dasar perusahaan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham berisikan mengenai jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, perhitungan tahunan, laporan tahunan, keputusan penggunaan laba perusahaan, pengangkatan akuntan publik, pengangkatan direksi, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal-hal yang tertera dalam anggaran dasar perusahaan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, maka dapat diketahui bahwa dengan adanya anggaran dasar tersebut perusahaan dapat menghindari adanya dominasi ataupun intervensi dari pihak tertentu karena semua hal telah diatur dalam anggaran dasar mengenai Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan ayat dalam anggaran dasar tersebut pengambilan keputusan dilakukan dalam RUPS untuk menghindari adanya dominasi dan juga intervensi dari pihak berkepentingan, misalnya ayat yang didalamnya terdapat "diputuskan penggunaan laba perseroan". Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan dalam menggunakan labanya melakukan RUPS dahulu sesuai dengan anggaran dasar, sehingga pemangku kepentingan dan pemegang saham dapat mengetahui dan menyetujui mengenai hal tersebut.

Anggaran dasar mengenai tugas dan wewenang dewan komisaris berisikan kewajiban dewan komisaris dan juga hak dari dewan komisaris. Pada anggaran dasar tersebut disebutkan bahwa dewan komisaris berhak untuk masuk ke bangunan dan halaman milik perusahaan pada jam kerja dan berhak untuk memeriksa keadaan perusahaan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya anggaran perusahaan tersebut perusahaan akan terhindar dari dominasi atau intervensi dari pihak berkepentingan karena data dalam perusahaan juga diawasi oleh dewan komisaris, sehingga hal tersebut juga memiliki kontribusi dalam *independency* perusahaan.

Anggaran dasar perusahaan mengenai direksi di dalamnya berisi mengenai tanggung jawab dan wewenang dari direksi. Dalam penghindaran intervensi dan adanya dominasi dalam perusahaan, dalam anggaran dasar mengenai direksi tersebut terdapat ayat yang mengatur mengenai pengambilan keputusan. Dengan adanya hal tersebut, dapat diketahui bahwa hal tersebut merupakan hal yang membantu *independency* dalam perusahaan karena pengambilan keputusan juga ikut diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Anggaran dasar dalam perusahaan membantu perusahaan dalam mempertahankan *independency* dalam perusahaan. Dengan adanya anggaran dasar yang mengatur organ dalam perusahaan maka organ dalam perusahaan baik RUPS, dewan komisaris, dan direksi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan terhindar dari adanya dominasi karena segala sesuatunya telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Dengan adanya aturan dalam anggaran dasar perusahaan tersebut maka proses pengambilan keputusan dalam perusahaan juga dapat dihindarkan dari adanya intervensi dari pihak tertentu.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan data dari perusahaan, menurut penulis prinsip *independency* pada PT. Panasia Indo Resource, Tbk. telah berjalan dengan baik karena selain memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh penulis, prinsip *independency* pada perusahaan juga telah sesuai dengan KNKG (2006) yang diantaranya masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi, bebas dari benturan kepentingan, dan tidak ada pelemparan tanggung jawab dalam perusahaan.

Cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan sudah baik karena melibatkan berbagai pihak yang bersangkutan sehingga terhindar dari kepentingan satu atau sekelompok pihak. Dengan hal tersebut maka perusahaan dapat berjalan dengan baik karena apabila tidak ada pihak yang mendominasi maka akan mengurangi tingkat ketidakpuasan pihak-pihak pada perusahaan. Apabila tingkat ketidakpuasan dalam perusahaan berada dalam tingkat yang minimal maka kinerja dari perusahaan akan lebih baik. Dengan baiknya kinerja perusahaan terutama dalam hal *independency* maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan penerapan *corporate governance* dalam perusahaan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan pemegang saham terhadap perusahaan. Disamping itu *internal audit* dan juga *quality assurance* menjaga jalannya perusahaan agar tetap sesuai dengan SOP ataupun sesuai dengan anggaran dasar perusahaan yang telah ditetapkan. Dengan adanya hal-hal tersebut maka perusahaan dapat berjalan secara independen.

5. Fairness

Fairness diperlukan dalam perusahaan karena dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kesetaraan dan kewajiban.

Dalam penerapan prinsip *fairness*, indikator yang digunakan adalah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat serta terbukanya akses informasi, perusahaan harus memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi, dan Tidak ada diskriminasi dan menghargai keragaman dalam perekrutan maupun dalam perusahaan.

Dalam perusahaan pemangku kepentingan dan atau pemegang saham diberikan kesempatan yang sama dalam memberikan pendapat dalam RUPS maupun akses informasi. Semua pemegang saham berhak memberikan suaranya namun pengambilan keputusan tetap diambil berdasarkan suara terbanyak.

PT. Panasia Indo Resources, Tbk. telah memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban. Perusahaan memperhatikan setiap pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban diantaranya diwujudkan dalam bentuk : kepentingan semua pemegang saham difasilitasi melalui RUPS, berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban, pegawai/karyawan, mitra bisnis, pelanggan, masyarakat memperoleh haknya sesuai dengan yang menjadi porsinya, dan terhadap pemerintah, Perusahaan menjalankan peraturan - peraturan yang menjadi kewajiban Perusahaan.

Asas kesetaraan dan kewajiban tersebut di dalam perusahaan adalah semua diperlakukan sama. Pemegang saham semua diundang dalam RUPS, undangan tersebut berupa undangan resmi dari perusahaan dan juga diiklankan di koran. Dengan adanya panggilan RUPS kepada pemegang saham melalui surat kabar dan majalah, maka perusahaan telah melakukan asas kesetaraan dan kewajiban dalam perusahaan. Dengan melakukan panggilan RUPS pada media masa, seluruh pemegang saham diperlakukan sama dan juga dengan adanya undangan pada media masa perusahaan memberikan transparansi dan juga *fairness* dalam hal RUPS dan tidak ada anggota yang tidak diundang ke dalam RUPS yang dilaksanakan oleh perusahaan. Dalam undangan tersebut juga dijelaskan bahwa setiap pemegang saham yang berhak hadir berhak untuk mengeluarkan suara.

Sumber daya manusia dalam perusahaan berasal dari berbagai macam etnis dan juga kewarganegaraan. Adanya aturan yang membuat seluruh karyawan bekerja sesuai dengan peraturan merupakan cara perusahaan dalam menjaga dan mengelola keragaman yang terjadi. Perusahaan juga membayar karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, tidak dibedakan dan berdasarkan kemampuan, apapun keragaman yang terjadi selama individu tersebut mampu maka tetap akan mendapatkan upah yang sesuai sehingga terjadi keadilan bagi semua pihak tanpa memandang Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).

Dalam proses perekrutan juga tidak dibedakan, semuanya berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Sistem seleksi dalam perusahaan sangat objektif karena penilaian seorang individu dilakukan oleh beberapa pihak. Cara perusahaan dalam menghindari adanya dominasi dan diskriminasi dalam perekrutan adalah dengan adanya standar *interview*, standar *test*, dan apabila seseorang karyawan melakukan rekomendasi terhadap rekannya untuk direkrut oleh perusahaan dan jika setelah masuk ke dalam perusahaan rekan tersebut melakukan kesalahan, maka yang merekomendasikan juga terkena punishment, sehingga karyawan pun hanya akan merekomendasikan orang yang berprestasi saja. Dalam perusahaan jenjang karir berjalan secara konkrit dan sesuai dengan pencapaian karyawan dalam hal ini adalah masa kerja, pengalaman, dan kinerja karyawan tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan data dari perusahaan, menurut penulis prinsip *fairness* pada PT. Panasia Indo Resource, Tbk. telah berjalan dengan baik karena selain memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh penulis, prinsip *fairness* pada perusahaan juga telah sesuai dengan KNKG (2006) yang diantaranya memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat, serta terbukanya akses informasi; memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan; dan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya tanpa membedakan.

IV. KESIMPULAN/RINGKASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Panasia Indo Resources, Tbk. yang terletak di Bandung, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran bagi perusahaan mengenai penerapan *corporate governance* pada perusahaan.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Prinsip *transparency* telah dijalankan dengan cukup baik oleh PT. Panasia Indo Resources, Tbk. Perusahaan memiliki media penyampaian informasi dan menyediakan informasi secara tepat waktu dan berkala, memadai, jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Pengambilan kebijakan pada perusahaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kecuali jika terdapat pemangku kepentingan yang berhalangan hadir, namun hal tersebut telah ditetapkan dalam anggaran perusahaan. Perusahaan juga memiliki kebijakan secara tertulis dalam wujud peraturan yang telah dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang terkait. Visi dan misi yang ditempelkan pada beberapa tempat di perusahaan merupakan visi dan misi yang lama dan tidak sesuai dengan visi dan misi baru yang tertera pada laporan tahunan 2012 perusahaan. Website perusahaan juga masih mencantumkan nama perusahaan yang lama dan tidak dilengkapi dengan data yang cukup.

2. Prinsip *accountability* telah dijalankan dengan cukup baik oleh PT. Panasia Indo Resources, Tbk. Perusahaan telah

memiliki rincian tugas dan tanggung jawab dimana dari tugas dan tanggung jawab tersebut mengacu pada tujuan perusahaan sehingga setiap organ perusahaan berperan dalam *good corporate governance* pada perusahaan. Pengendalian *internal* pada perusahaan adalah *internal audit* dan juga *quality assurance*. Pengukuran kinerja dan *monitoring* dalam perusahaan dilakukan melalui *meeting* secara berkala, pada perusahaan telah terdapat etika bisnis dan juga pedoman perilaku, pedoman perilaku dalam perusahaan hanya sebatas peraturan dan dari etika bisnis tersebut menjadi budaya perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Dalam perusahaan juga telah terdapat *code of conduct*. Perusahaan juga memberlakukan larangan keras untuk penerimaan donasi. Kerahasiaan informasi dalam perusahaan dilakukan dengan cara melakukan *meeting* yang sesuai dengan jenjangnya, *president director* atau komisaris menyampaikan kepada anggota *meeting* untuk menjaga kerahasiaan informasi, dan juga sanksi terhadap karyawan yang melakukan pembocoran informasi. Pada perusahaan telah terdapat perlindungan terhadap pemberi informasi mengenai pelanggaran, *reward*, dan *punishment*. Namun perlindungan terhadap pelaporan pelanggaran, *reward*, dan *punishment* tersebut bukan merupakan peraturan tertulis dari perusahaan.

3. Prinsip *responsibility* telah berjalan dengan baik pada PT. Panasia Indo Resources, Tbk. Perusahaan telah menaati undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Disamping itu perusahaan juga telah memiliki pertanggungjawaban sosial terhadap lingkungannya dengan cara melakukan kegiatan sosial secara berkala, memberikan penerangan dan air bersih secara gratis bagi warga sekitar, dan juga mengolah limbah sebelum dialirkan ke sungai. Karyawan perusahaan juga telah mendapatkan upah yang layak yaitu diatas UMK.

4. Prinsip *independency* pada PT. Panasia Indo Resources, Tbk telah berjalan dengan baik karena perusahaan dapat mengambil keputusan dengan menghindari adanya dominasi ataupun intervensi dari pihak tertentu dan di dalam perusahaan tidak ada pelimpahan ataupun dominasi tanggung jawab karena semua sudah ditetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi.

5. Prinsip *fairness* pada PT. Panasia Indo Resources, Tbk telah berjalan dengan baik karena perusahaan telah memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat dalam RUPS serta terbukanya akses informasi bagi pemangku kepentingan. Perlakuan yang adil dan setara juga diberikan oleh perusahaan kepada pemangku kepentingan. Di dalam perusahaan tidak terdapat diskriminasi baik dalam hal perekrutan maupun dalam hal perusahaan menghadapi keragaman yang ada di dalam perusahaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi PT. Panasia Indo Resources, Tbk guna meningkatkan kinerja perusahaan berdasarkan penerapan prinsip *corporate governance* dalam perusahaan. Dari penelitian tersebut penulis memberikan saran:

1. Hendaknya perusahaan memperbarui visi dan misi yang ditempelkan pada berbagai sudut ruangan yang disesuaikan

dengan visi dan misi terbaru terutama sesuai dengan laporan tahunan perusahaan.

2. Hendaknya perusahaan melakukan *update website* resmi perusahaan dalam hal ini nama perusahaan dan juga melakukan pelengkapan terhadap informasi yang dapat dilihat melalui *website* seperti laporan keuangan dan *corporate action* yang diambil oleh perusahaan.

3. Hendaknya PT. Panasia Indo Resources, Tbk. membuat peraturan yang jelas mengenai sistem *reward* dan *punishment* pada perusahaan.

4. Hendaknya PT. Panasia Indo Resources, Tbk. membuat peraturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap adanya pelanggaran pelanggaran dalam perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. Corporate Governance. IndoAgri. Retrieved* Oktober 2,2013 *from* http://indofoodagri.listedcompany.com/corp_governance.html
- Administrator. Corporate Governance. Nestle. Retrieved* Oktober 2,2013 *from* <http://www.nestle.com/investors/corporate-governance>
- Administrator. Ekspor Tekstil Tumbuh 3% Semester 1 2013. Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Retrieved* November 16,2013 *from* <http://apidki-jakarta.weebly.com/1/post/2013/11/ekspor-tekstil-tumbuh-3-semester-i-2013.html>
- Administrator. Industri Tekstil China Ekspansi ke Indonesia. Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Retrieved* November 16,2013 *from* <http://apidki-jakarta.weebly.com/1/post/2012/02/industri-tekstil-china-ekspansi-ke-indonesia.html>
- Administrator. Kememperin Terus Dorong Pertumbuhan Industri TPT. Suara Pembaruan. Retrieved* November 16,2013 *from* <http://www.suarapembaruan.com/home/kemenperin-terus-dorong-pertumbuhan-industri-tpt/34141>
- Administrator. Pemerintah janji Genjot Pertumbuhan Industri Tekstil. Berita Satu. Retrieved* November 16,2013 *from* <http://www.beritasatu.com/ekonomi/89553-pemerintah-janji-genjot-pertumbuhan-industri-tekstil.html>
- Administrator. Pertumbuhan Industri Tekstil 2012 Diprediksi Tumbuh Tipis. Antara. Retrieved* November 16,2013 *from* <http://id.berita.yahoo.com/pertumbuhan-industri-tekstil-2012-diprediksi-tumbuh-tipis-092623076.html>
- Administrator. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Retrieved* Januari 16,2014 *from* <http://portal.jogjaprovo.go.id/attachments/article/106/UU13-2003%20perlindungan%20naker.pdf>
- Annual Report 2012 Panasia Indo Resources. Panasia Indo Resources. Retrieved* November 16,2013 *from* <http://quicktake.morningstar.com/StockNet/SECDocuments.aspx?Symbol=HDTX&Country=IDN>
- Hery (2013). *Rahasia Pembagian Dividen & Tata Kelola Perusahaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indra, S. & Yustiavandana, I. (2008). *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. New York: SAGE Publications.
- Monks, R.A.G. & Minow, N. (2004). *Corporate Governance*, (3rd ed.). Malden, MA: Blackwell Publishing.
- National Committee on Governance. Indonesia's Code of Good Corporate Governance*. KNKG. Retrieved Oktober 4,2013 *from* http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Tunggal, H. S. (2013). *Internal Audit & Corporate Governance*. Jakarta: Harvarindo.
- Teresia, Ananda. *Penjualan Domestik Tekstil Bakal Turun 10 Persen*. Tempo. Retrieved November 16,2013 *from* <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/08/090452921/Penjualan-Domestik-Tekstil-Bakal-Turun-10-Persen>
- Usman, A. S. *Perkembangan Industri TPT Nasional 2013*. Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Retrieved November 16,2013 *from* <http://www.perbanas.org/data/MakalahPerbanasMay11.pdf>
- Wahyudin, Mahifal. *To Know the Guidance of Good Corporate Governance in Indonesia (Indonesian)*. Rochester., 2011. ProQuest. Web. 28 Sep. 2013.